TUGAS II E LEARNING

MATA KULIAH : MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PROGRAM STUDI : NAJEMEN S2 ANGKATAN 33A/R1
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
TAHUN 2019/2020

DOSEN :Dr. FARHAT SYUKRI, SE. M.Si

Setelah membaca materi II e learning Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi, maka kepada mahasiswa ditugaskan menganalisa :

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.
   - Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.
   - .Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara
2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa. Jelaskan pendapat saudara !!

SELAMAT BEKERJA

NAMA : **Derta Bela Sanjaya**
NIM : **182510079**
PRODI : **S2 - Manajemen**
M.KULIAH : **Manajemen Perubahan Dan Pengembangan Organisasi**
DOSEN : **Dr. Farhat Syukri, SE., M.Si.**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. **Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.**
   - **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
   - **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

Nama : **Dewi Puspita Sari**

Nim : **182510083**

Prodi : **S2 Manajemen UBD / Angkatan 33 / A R1**

MK : **Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi**

Dosen : **Dr. Farhat Syukri, SE, M.Si**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.

- **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
- **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

Tugas II MPPO reg 33 R1

Disusun Oleh :

Eka Juhita (182510086)

Dosen Pembimbing : Dr. Farhat Syukri, SE. M.Si

Mata Kuliah : Manajemen Perubahan dan Perkembangan Organisasi

Angkatan : 33 / AR1

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2020

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.
   - Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.
   - .Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara

Jawab

Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia karena dengan adanya Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur

- **Latar belakang munculnya pemikiran tersebut**

Organisasi pemerintah suatu entitas negara sebagai birokrasi yang dijalankan oleh sumber daya manusia dalam hal ini aparatus sipil negara (ASN). Tugas fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan kepada masyarakat dan perekat dan pemersatu bangsa. Organisasi pemerintah mendapat stigma sebagai organisasi yang berstruktur gemuk, lamban, inefisien dalam menjalankan fungsinya. Untuk meningkatkan peran fungsi ASN sebagai birokrat, maka konsep mewirausakan birokrasi sangatlah tepat untuk diterapkan di semua lini, baik di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah yang mengalihakn sebagai otoritasnya ke daerah dengan memberikan otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya mengaru birokrasi agar dapat berjalan secara akuntabilitas, inovatif dan professional. Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur.

- **Analisa / Persepsi**

Di era otonomi daerah ini menurut saya konsep mewirausahaakan birokrasi sangatlah baik untuk diterapakan karena dapat mengatur birokrasi agar berjalan secara akuntabilitas, responsive, inovatif, dan professional serta entrepreneur. Konsep mewirausahakan

birokrasi juga akan membuat pelaksananya terutama ASN lebih inovatif dalam memberika pelayanan public yang dapat menjawab perkembangan masyarakat di era globalisasi. Dengan adanya konsep mewirausahakan birokrasi, sebuah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan pemerintahan dengan model entrepreneur government akan memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumbersumber ekonomi yang lebih efektif dan efisien guna mengejar ketertinggalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya mewirausahalan birokrasi juga akan berdampak pada perubahan-perubahan (reformasi) dalam instansi Pemda. Perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme birokrasi wirausaha disetiap lapisan birokrasi. Lebih meluas lagi, upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daeah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran Pemerintah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era globalisasi

2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan bulik, dan pemersatu bangsa. Jelaskan pendapat saudara !!

Jawab :

Kepemimpinan wirausahan akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat Peluang setiap saat, namun seorang pemimpin enterpreneur leadership, akan senantiasa mampu merespon setiap peluang yang ada guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, bagi pemimpin enterpreneur kemampuan untuk melihat dan membaca peluang menjadi kata kunci untuk memajukan perusahaannya Demikian pula dalam birokrasi seorang pemimpin kewirusahaan akan senantiasa melihat berbagai peluang yang ada demi tercapainya Visi misi organisasi termasuk menciptakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat yang akan memberikan manfaat besar dan membuat masyarakat yang diberikanan pelayanan merasakan kemanfaatan dan rasa puas. Sehingga Pimpinan organisasi pemerintah perlu

memiliki kepemimpinan wirausaha karena Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur sehingga dengan adanya kepemipinan wirausaha maka tugas dan fungsi pegawai pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan pulik, dan pemersatu bangsa dapat terlaksana dengan baik.

Nama : Erwin

NIM : 182510088

Prodi : Magister Manajemen

Tugas 2

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia. Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut. Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara?
2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha..padahal tujuan pencari kerja menajadi pegawai pemerintah tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Ingonesia. Jelaskan pendapat saudara?

Jawaban :

1. Program mewirausahakan birokrasi di Indonesia didorong Pemerintah Indonesia dan apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut ? karena Organisasi pemerintah mendapat stigma sebagai organisasi yang berstruktur gemuk, lamban, inefisien dalam menjalankan fungsinya. Untuk meningkatkan peran fungsi ASN sebagai birokrat, maka konsep mewirausakan birokrasi sangatlah tepat untuk diterapkan di semua lini, baik di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah yang mengalihakn sebagai otoritasnya ke daerah dengan memberikan otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya mengaru birokrasi agar dapat berjalan secara akuntabilitas, inovatif dan profesional.

   Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur. Birokrasi yang profesional dalam menggali potensi kerjasama dan tidak

semata-mata bersandar pada beban biaya kepada anggaran pemerintah, tetap justru dapat memberikan profit kepada negara.

Pendapat saya mengenai hal ini adalah positif, karena hal ini dapat merubah persepsi masyarakat mengenai pemerintah yang lamban, inefisien, dll menjadi lebih baik. Walaupun pada praktek lapangannya masih belum terlaksana dengan baik karena hal ini sangat membutuhkan profesionalisme aparat pemerintah dalam menjalankannya.

2. Tentu saja diperlukan, seorang pemimpin harus memiliki hal tersebut. Karena kepemimpinan tersebut mengandung banyak aspek seperti kemampuan manajerial, kemampuan memimpin, dll.

TUGAS 2

Disusun Oleh :

NAMA : IMA MARDIANA

NIM : 182510104

Dosen Pengampuh : Dr. Farhat Syukri, SE, M.Si

Mata Kuliah : Manajemen Perubahan dan Perkembangan Organisasi

Angkatan : 33 / ARI

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

TAHUN 2020

TUGAS 2 MPPO REG 33 R1

Setelah membaca materi II e-learning Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi, maka kepada mahasiswa ditugaskan menganalisa :

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.
   - Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.
   - Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara.
2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Jelaskan pendapat saudara !!

Jawaban:

1. Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia karena dengan Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur. Birokrasi yang profesional dalam menggali potensi kerjasama dan tidak semata-mata bersandar pada beban biaya kepada anggaran pemerintah, tetap justru dapat memberikan profit kepada negara.
   - Yang yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran tersebut adalah Organisasi Pemerintah, yang dijalankan oleh sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan kepada masyarakat dan perekat dan pemersatu bangsa. Organisasi pemerintah mendapat stigma sebagai organisasi yang berstruktur gemuk, lamban, inefisien dalam menjalankan fungsinya.

- Menurut pendapat saya, program mewirausahakan birokrasi merupakan program yang tepat untuk proses perubahan didalam pemerintahan untuk diterapakan karena dapat mengatur birokrasi agar berjalan secara akuntabilitas, responsive, inovatif, dan professional serta entrepreneur. Program mewirausahakan birokrasi juga akan membuat pelaksananya terutama ASN lebih inovatif dalam memberika pelayanan public yang dapat menjawab perkembangan masyarakat di era globalisasi. Dengan adanya program mewirausahakan birokrasi ini, sebuah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan pemerintahan dengan model entrepreneur government akan memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumbersumber ekonomi yang lebih efektif dan efisien guna mengejar ketertinggalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya mewirausahalan birokrasi juga akan berdampak pada perubahan-perubahan (reformasi) dalam instansi Pemda. Perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme birokrasi wirausaha disetiap lapisan birokrasi. Lebih meluas lagi, upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran Pemerintah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era globalisasi

2. Menurut pendapat saya, Kepemimpinan wirausahan akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat Peluang setiap saat, namun seorang pemimpin enterpreneur leadership, akan senantiasa mampu merespon setiap peluang yang ada guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, bagi pemimpin enterpreneur kemampuan untuk melihat dan membaca peluang menjadi kata kunci untuk memajukan perusahaannya Demikian pula dalam birokrasi seorang pemimpin kewirusahaan akan senantiasa melihat berbagai peluang yang ada demi tercapainya Visi misi

organisasi termasuk menciptakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat yang akan memberikan manfaat besar dan membuat masyarakat yang diberikanan pelayanan merasakan kemanfaatan dan rasa puas. Sehingga Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha karena Penerapan wirausaha birokrasi akan meninggalkan kebiasaan pola lama dalam pelayanan yang lamban, berbelit belit dan inefisiensi bergeser ke pelayanan inovatif, kreatif dan profesional, serta berani mengambil resiko guna melakukan terobosan yang terukur sehingga dengan adanya kepemipinan wirausaha maka tugas dan fungsi pegawai pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan pulik, dan pemersatu bangsa dapat terlaksana dengan baik.

1. Yang mendorong Pemerintah Indonesia medorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia

   Konsep mewirausahakan Birokrasi (*Reinventing Government*) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalm buku mereka yag berjudul *Reinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sector*. Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal.

   Adapun yang beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut adalah:

   a. Semakin kompleksnya permasalahan permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi;
   b. Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar;
   c. Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik;
   d. Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat;
   e. Ada fakta/realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan dari pada sektor publik.

   Menurut pendapat saya, memang sudah seharusnya program mewirausahakan birokrasi ini dilaksanakan. Kita sendiri sudah merasakan bagaimana berurusan dengan pemerintah, pelayanan yang lamban, birokrasi yang berbelit belit, dan masih banyak yang belum memanfaatkan IT sebagai alat dalam mengefektifkan pekerjaan.

Dengan adanya program mewirausahakan birokrasi, dapat memacu pendapatan pemerintah daerah bukan hanya berasal dari dana PAD dan kucuran DAU/DAK, tetapi pemerintah daerah dapat mencari sumber dana dengan melakukan usaha sendiri dalam rangka membangun daerah dan membiayai kegiatan rutin pemda. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang selama ini lamban, sengaja dicari cara untuk lamban, maka dapat menjadi cepat dan dengan biaya yang murah atau sama sekali tanpa dipintah biaya jasa oleh ASN. Selanjutnya instansi pemerintah juga dituntut untuk bekerja dengan menggunakan IT yang up to date, sehingga dapat terwujud kinerja yang efektif dan efisien.

2. Apakah pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha

   Menurut pendapat saya, sudah semestinya pimpinan organisasi pemerintah memiliki kepemimpinan wirausaha. Dengan jiwa wirausaha, seorang pimpinan dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja secara profesional, bukan dengan jiwa buruh, walaupun mereka mendapat gaji bulanan sama seperti seorang buruh. ASN yang profesional, mereka akan bekerja dengan orientasi pelayanan yang prima. Begitu juga seorang pimpinan yang memiliki jiwa wirausaha, dalam bekerja mereka selalu inovatif, konstruktif, adaptif, dan visioner. Mereka akan selalu berusaha mencari cara bagaimana menemukan cara bekerja/ atau alat bantu kerja agar mendapatkan output kinerja yang lebih bagus dan efektif.

NAMA : Michael Jackson

NIM : 182510075

PRODI : Manajemen S2

MK : Manajemen Perubahan dan Perkembangan Organisasi

DOSEN : Dr. Farhat Syukri, SE., M.Si.

TUGAS II

1. Pemerintah mendorong program wirausaha birokrasi

Menurut saya mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebijakan agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

- Organisasi pemerintah yang lamban, sehingga cenderung bersifat *spending* dari pada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
- Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

2. Pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha

Mewirausahakan birokrasi adalah proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng. bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu :

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Ada fakta/realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan dari pada sektor publik.

NAMA : **MOHD. AMRAH RIDHO**

NIM : **182510080**

PRODI : **S2 - MANAJEMEN**

M.KULIAH : **Manajemen Perubahan Dan Pengembangan Organisasi**

DOSEN : **Dr. Farhat Syukri, SE., M.Si.**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. **Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.**
   - **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
   - **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

1. Latar belakang munculnya pemikiran bahwa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausakan birokrasi di Indonesia.

   Mewirausakan birokrasi atau *Reinventing Goverment* muncul sebagai respon atas buruknya layanan publik pemerintah yang **menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat** terhadap pemerintah. Buruknya layanan publik tersebut seperti minimnya fasilitas pendidikan , kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Daerah yang mengalami defisit sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran juga dapat dilihat sebagai indikator buruknya pelayanan publik suatu negara.

   Mewirausakan birokrasi mengandung konsep dimana negara dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang kadang-kadang bersaing dengan pihak swasta, tapi di lain pihak dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun tetap dengan kewajiban memberikan layanan dan kualitas yang maksimal.

2. Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha dikarenakan akan mampu menciptakan suatu sistem yang efektif, efisien, responsive dan accountable terhadap kepentingan publik. Unsur pimpinan ini memegang peranan penting karena yang akan menetukan arah tujuan dari pemerintahan, biasanya arahan dari unsur pimpinan akan cepat medapatkan respon dari pegawai yang lain.

   Adapun yang harus dipersiapkan oleh pimpinan organisasi dalam implementasi mewirausahakan birokrasi adalah :
   a. Menyiapkan strategi inti
      Menentukan tujuan sebuah sistem dan organisasi publik, sehingga dapat mencapai misi dan visi suatu pemerintahan .
   b. Strategi konsekuensi
      Menerapkan *punishment dan reward* kepada pegawai, seperti tunjungan kesehatan, kenaikan gaji dan lainnya yang akan memicu kinerja yang lebih baik.
   c. Strategi pelanggan
      Diharapkan dapat meningkatkan tekanan terhadap organisasi publik untuk memperbaiki kinerja atau pengelolaan sumber-sumber organisasi.
   d. Strategi pengawasan
      Mendesentralisasikan pembuatan keputusan kepada pejabat atau pegawai yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pegawai birokrasi dan dalam konteks luas mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan
   e. Strategi Budaya
      Menentukan budaya organisasi publik yang menyangkut nilai, norma dan tingkah laku dan harapan para karyawan.

NAMA : **PENI OKTA SARI**

NIM : **182510078**

PRODI : **S2 - MANAJEMEN**

M.KULIAH : **Manajemen Perubahan Dan Pengembangan Organisasi**

DOSEN : **Dr. Farhat Syukri, SE., M.Si.**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. **Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.**
   - **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
   - **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

Nama **: Rina Marfiana**

NIM **: 182510076**

Matkul **: Manajemen Perubahan Organisasi**

BERBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN, INOVATIF, RESPONSIF DAN AKUNTABEL

Dengan munculnya paradigma organisasi era pasca 1980 yang lebih dikenal dengan *colaborative individual*, yang di antaranya mengisyaratkan agar organisasi melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain atau hubungan antara pegawai/individu dengan organisasi didasarkan pada kontrak, sama sekali tidak direspon oleh organisasi publik di Indonesia. Penerimaan pegawai di organisasi publik (organisasi pemerintah) mulai awal masa pemerintahan orde baru hingga berakhirnya masa pemerintah tersebut masih menggunakan standar seumur hidup (*long life*). Bahkan demi kepentingan politik tertentu penerimaan pegawai tidak memperhatikan *work force* dan *work load*-nya. Belum ada penambahan struktur dan fungsi yang dijalankan tetapi pegawai tetap ditambah, sehingga tidaklah mengherankan kalau pada masa otonomi daerah banyak pegawai yang resah karena tidak mendapatkan tempat, meskipun mereka tetap menerima gaji. Ketidakseimbangan antara *work force* dan *work load* menjadikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kelabakan karena harus bertindak efisien akibat keterbatasan dana. Di satu sisi pemerintah harus bertindak rasional di sisi lain pemerintah harus tetap memperhatikan faktor kemanusiaan. Tidak mungkin pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pegawai di organisasi publik.

Demikian juga dengan terbitnya *Reinventing Government* tahun 1992 dan *Banishing Bureucracy* tahun 1997, diharapkan organisasi publik mampu menerapkan semangat *entrepreneur* dengan sepuluh prinsip wirausahanya dan diteruskan dengan menerapkan lima strategi inti agar organisasi publik dapat efisien serta meningkatkan kinerjanya. Namun apa yang terjadi bangsa Indonesia dengan pemerintahan orde

barunya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap perkembangan birokrasi di era global nanti. Birokrasi yang seharusnya netral terhadap kepentingan politik, justru digunakan sebagai kendaraan politik bagi partai politik tertentu, sehingga fungsi birokrasi yang seharusnya sebagai pelayanan masyarakat berubah fungsi sebagai pelayan penguasa. Pemerintah masih enggan untuk melepaskan wewenang yang begitu besar yang dikendalikan secara sentralistik, yang telah berhasil menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya.

Para pakar administrasi publik atau pakar birokrasi atau ahli-ahli lain tidak jemu-jemunya menyarankan agar birokrasi di Indonesia segera melakukan pembaharuan, kalau tidak ingin ditelah arus globalisasi. Namun apa yang disarankan hanya sebatas diterima, belum direalisasikan, sehingga patologi birokrasi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat justru oleh penguasa dan kroni- kroninya dihidup suburkan karena memang menguntungkan mereka.

Setelah bangsa Indonesia dilanda krisis dan paradigma baru otonomi daerah sebagai salah satu alternatif, mau tidak mau birokrasi harus direformasi. Bahkan pakar birokrasi Miftah Toha tahun 1996 sebelum Indonesia dilanda krisis, sudah menyarankan agar birokrasi di Indonesia segera direvitalisasi. Ada tiga alternatif dalam merevitalisasi birokrasi, ketiga hal tersebut adalah masalah kepemimpinan birokrasi, masalah tentang sistem, proses dan prosedur birokrasi publik, dan masalah kelembagaan birokrasi (Miftah Toha, 1996). Adapun ciri-ciri birokrasi yang harus dikembangkan pada masa pemerintahan sekarang ini adalah :

a. Pemerintah yang katalik yang lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai implementator;
b. Pemerintah yang sinergik yang mampu melihat kelemahan sendiri dan kebaikan pihak lain dan kemudian mengupayakan perbaikan yang lebih kompreshensif dan produktif;
c. Pemerintah dari satu masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat bukan hanya untuk mengatur saja;
d. Pemerintah yang kompetitif yang mampu meng-*energized* semangat kompetitif dalam pelayanan publik;
e. Pemerintah yang lebih didorong oleh misi yang jelas, bukannya sekedar birokrasi

yang mendasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

f. Pemerintah yang berorientasi kepada pengaruh ketimbang mengutamakan kekuasaan saja;
g. Pemerintah yang mendorong timbulnya *entrepreneurship* ketimbang hanya menekankan kepada hal-hal yang rutin;
h. Pemerintah yang menekankan dan mengutamakan adanya demokrasi dan desentralisasi dari pada yang menekankan peranan yang hirarki;
i. Pemerintah yang lebih banyak menekankan betapa pentingnya *adhocrasy*, bekerja dalam tim ketimbang menekankan peran seektoral;
j. Pemerintah yang lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan aturan.

Kualitas pelayanan pemerintah kepada publik akan meningkat seiring iklim kompetitif yang telah bergulir. Rentang kendali (*span of control*) yang lebih dekat akan memudahkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik.

Agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik maka birokrasi harus mengubah posisi dan peran yang selama ini dimainkan (Miftah Toha, 1996). Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang selalu berpendekatan kekuasaan dan monolog berubah ke arah yang fleksibel, kolaboratis dan dialogis serta dari ciri-ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat. Peran organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat jangan diremehkan. Tampaknya ada gejala bahwa proses inovasi masyarakat lebih cepat dimulai dari pihak swasta ketimbang dari organisasi birokrasi publik.

Sudah saatnya birokrasi publik mengadopsi prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis, seperti yang diterapkan negara tetangga Malaysia dalam mengantisipasi perubahan global abad 21. Ada tiga langkah besar yang dilakukan pemerintah negara tersebut untuk mewujudkan misi mereka; yaitu Adopsi ISO 9000, pengembangan manajemen kualitas total (TQM) dan penerapan teknologi informasi

elektronik secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan *good governance* antar organisasi di lingkungan pemerintah dan organisasi-organisasi diluarnya, baik dalam skala lokal maupun nasional (Muhammad Rais Abdul Karim, lihat Muhajir Darwin, 2000). ISO 9000 diterapkan untuk satu tujuan dasar, memenuhi kebutuhan rakyat atau mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik dikembangkan satu prinsip yang fundamental yaitu : *doing the right thing right, first time and every time* (melakukan sesuatu yang benar secara benar, segera dan setiap waktu). Tentu saja perubahan tersebut tidak bisa berhenti di slogan. Ada dua puluh (20) persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu organisasi mendapat sertifikat ISO 9000 yang meliputi kontrol proses, kontrol produk, inspeksi, testing, pelatihan, auditing kualitas internal, *review* kontrak, tanggung jawab manajemen, dan sebagainya.

Terkait dengan ISO 9000 adalah penerapan manajemen mutu total (*total quality management*) yang disingkat TQM. Ini merupakan teknik manajemen yang diarahkan untuk mengoptimalkan mutu produk ataupun proses manajerial. TQM mengandung tiga elemen yaitu: manajemen, personal dan sistem. Pada elemen manajemen ada empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu strategi, kepemimpinan, organisasi dan *resources*. Organisasi perlu dikembangkan secara terarah dengan strategi yang jelas. Untuk itu organisasi harus merumuskan visi masa depannya secara jelas dan mengaktualisasikan visi tersebut ke dalam misi.

Agar strategi dapat diimplementasikan diperlukan seorang sosok pemimpin yang visioner, yang mampu mengembangkan kepemimpinan yang efektif yang dapat membentuk visi terhadap bawahannya, dapat menggugah semangat dan memberi inspirasi bagi bawahan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas serta memelihara tanggung jawabnya.

Pemimpim yang visioner dapat berbuat banyak bagi organisasi, antara lain dengan menata organisasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan jaman dengan melakukan pembenahan struktur, personalia, dan sistem serta prosedur organisasi. Selanjutnya *resources* yang dikuasai organisasi perlu diindentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

Sedangkan aspek *resources*, TQM menuntut pengelolaan personal secara optimal, antara lain dengan pembentukan sikap dari personal tersebut agar lebih mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik dan dapat menegakkan perilaku yang kredibel dan akuntabel.

Aspek organisasi, penerapan ISO 9000 akan efektif jika organisasi dapat memanfaatkan teknologi informasi elektronika secara terintegrasi. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan reorientasi pada seluruh staf, penguasaan personal terhadap instrumen tersebut dan memanfaatkan instrumen tersebut secara optimal. Bagaimana dengan situasi di Indonesia, mungkinkan apa yang diterapkan di Malaysia bisa dilakukan di tanah air. Situasi bangsa Indonesia sangat berlainan dengan di Malaysia, Indonesia masih disibukkan dengan penyelesaian krisis ekonomi, yang dibarengi dengan krisis politik yang tentunya tidak mudah untuk menciptakan birokrasi seperti di Malaysia. Namun bukan berarti bangsa Indonesia tidak berusaha untuk menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel. Warsito Utomo, dalam artikelnya di Kedaulatan Rakyat bulan Mei 2001 memberikan saran apabila melakukan reformasi birokrasi, antara lain:

1. Perlu mengembalikan atau mengingatkan kembali akan misi, tujuan dari birokrasi, agar supaya apa yang dilakukan oleh para birokrat tepat pada sasarannya;
2. Untuk hal pertama tidak saja hanya dilaksanakan secara konsisten, tetapi juga perlu dipikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan remunerasi. Di mana pengaturan remunerasi akan memberikan motivasi yang positif;
3. Tuntutan birokrasi yang direformasi adalah birokrasi yang tidak terlalu terikat oleh kontrol, orde dan *prediction*, tetapi lebih mengarah kepada birokrasi yang terfokus kepada *alignment creativity* dan *empowerment*. Dan ini semua menghendaki adanya kebijakan yang berorientasi kepada *loose and tight principles* di mana *political commitment* dipakai sebagai suatu arahan atau pedoman, bukannya *political authority;*
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau prulalis yang masing-masing memiliki *value* dan tradisinya sendiri-sendiri yang dapat membentuk budaya organisasi atau budaya birokrasi, sehingga reformasi birokrasi juga harus

memperhatikan budaya atau keberadaan daerah;

5. Birokrat harus sadar bahwa mereka merupakan pelayanan publik, sehingga mereka dapat membuat atau menciptakan organisasi untuk melayani masyarakat.

Reformasi birokrasi sebenarnya bukan merupakan hal sulit, hal ini terbukti di berbagai daerah di Indonesia seperti di Pemerintah Daerah Kabupaten Sokoharjo Provinsi Jawa Tengah, sedang dirintis atau memulai mereformasi birokrasi di berbagai kantor seperti di Kantor Pelayanan terpadu dan di Kantor Bersama Samsat. Di kedua kantor tersebut telah diterapkan adanya pelayanan satu atap, di mana masyarakat yang memerlukan pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Pelayanan Terpadu dan pelayanan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat, apabila semua syarat sudah terpenuhi maka pelayanan yang dijanjikan adalah tidak lebih dari satu jam urusan sudah selesai. Masyarakat hanya membayar di satu loket, kemudian menunggu paling lama satu jam, semua urusan sudah selesai. Idealnya memang semua urusan di semua instansi pemerintah/ birokrasi adalah seperti itu, dan hal ini merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia, yang selama ini hanya mendengar reformasi birokrasi lewat pernyataan- pernyataan birokrat, para ahli, media masa dan sumber-sumber lain, tetapi dalam kenyataannya belum terwujudkan. Reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pada reformasi dilingkup struktur, proses atau prosedur saja, tetapi yang lebih penting adalah reformasi dilingkup moral, mental atau sikap.

PENUTUP

Untuk menciptakan suatu organisasi agar efisien, berbagai paradigma muncul mulau dari era pasca 1980 dengan *Colaborative* Individu, *Reinventing Government* dan *Banishing Bureucracy* semuanya bermuara agar organisasi publik/birokrasi bisa menjadi kompetitif dan memainkan peran yang tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku dalam mekanisme pasar yang sangat kompetitif. Keberhasilan negara tetangga Malaysia dalam mereformasi birokrasi, berbagai pendapat para ahli agar organisasi publik segera direvitalisasi/direformasi bukanlah suatu jaminan bahwa bangsa Indonesia akan mau dan mampu melakukan reformasi. Semuanya tergantung pada *political will*

dan niat yang tulus bahwa reformasi birokrasi bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan demi menyelamatkan agar bangsa Indonesia tidak tenggelam dalam percaturan global. Untuk itu reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada struktur, proses atau prosedur saja tetapi juga reformasi moral dan sikap para birokrat. Tanpa ada kesadaran untuk mengurangi atau menghapus berbagai bentuk patologi birokrasi, maka reformasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel hanya akan sebatas pernyataan belaka.

2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha padahal tujuan pencari kerja menajadi pegawai pemerintah tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Ingonesia. Jelaskan pendapat saudara.

Salah satu hal yang menarik saat ini untuk menjadi terobosan baru didalam lingkup birokrasi pemerintahan adalah bagamana penerapan kepemimpinan kewirausahaan dalam Birokrasi pemerintahan atau bagaimana mentrasfer kesuksesan para CEO-CEO perusahan sukses didunia mampu direplikasi pada birokrasi Pemerintahan demi tercapainya pelayanan publik yang setara dengan layanan swasta, istilah kepemimpinan kewirausahaan sudah lama dikenal dalam dunia usaha hampir semua peursahaan-peruhsaan besar didunia ini yang memilii omzet triliunan pasati memiliki pemimpin yang andal dan memiliki andil besar dalam memajukan perusahaannya tersebut karena itu kepemimpinan tersebut dikenal secara umum sebagi *enterpreneurial Leadership*.

Secara umum Entreprenurial Leadership atau kepemimpinan kewirausahaan bisa dikatakan merupakan sebuah kemampuan seorang pemimpin untuk mengorgnisir sekelompok orang yang bekerja dalam organisasinya untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan perilaku proaktif kewirausahaan dnegan pendekatan mengoptimalkan Resiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab pribadi dan mengelolah perubahan dalam lingkungan organisasi yang dinamis untuk kepentingan organisasi.

Borokrasi pemerintahan saat ini memang sudah selayanya dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kemampuan Enterpreneurial Leadership karena itu pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau PKN tingkat II materi pelatihan Kepemimpinan kewirausahaan menjadi salah satu mata pelatihan untuk membekali para pemimpin pratama atau para kepala Dinas maupun kepala badan memiliki kemampuan kepemimpinan kewirausahaan.Ada tiga kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi *Enterpreneurial Leadership* yakni:

Pertama, "***Opportunity Seeker*** ",seorang pemimpin kewirausahaan harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat Peluang setiap saat, meskipun berstatus ASN namun seorang pemimpin enterpreneur leadership, akan senantiasa mampu merespon setiap peluang yang ada guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, bagi pemimpin *enterpreneur* kemampuan untuk melihat dan membaca peluang menjadi kata kunci untuk memajukan perusahannya

Demikian pula dalam birokrasi seorang pemimpin kewirusahaan akan senantiasa melihat berbagai peluang yang ada demi tercapainya Visi misi organisasi termasuk menciptakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat yang akan memberikan manfaat besar dan membuat masyarakat yang diberikana pelayanan merasakan kemanfaatan dan rasa puas.

Mengubah layanan manual menjadi layanan digital , pelayanan terpadu satu pintu, atau menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti misalnya yang pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah yakni mampu mencari peluang untuk mendapatkan bantuan dari jepang, salah satu contohnya dalam bidang pelayanan kesehatan bantuan Mabulance supercanggih jepang mampu didapatkannya .semua hal tersebut tentunya tidak lepas daripada kemampuan Enterpreneur leadership dari sang bupati yang saat ini sukses menjadi Gubernur Sulawesi selatan Bapak Nurdin Abdullah.

Kedua "*Risk Taker",* salah satu kunci untuk sukses menjadi pemimpin entrepreneurial leadership adalah kemampuan untuk berani mengambil resiko yakni suatu kemampuan merima kemungkinan kemungkinan akan adanya resiko yang bisa saja datang akibat keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Ketiga *"Resource allocator"* seorang pemimpin enterpreneur leadership tetunya memiliki kemampuan untuk senantiasa memnafaatka sumber daya yang ada baik manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan kembali atau dikelolah sehinggah mampu mendatangkan dampak positif bagi organisasi.

Tiga kunci ini adalah sebahagian kemampuan yang harus dimiliki seorang Pemimpin kewirausahaan, termasuk menerapkan dalam aspek birokrasi pemerintahaan.

Nama : **Titin Andriani**

Nim : **182510084**

Prodi : **S2 Manajemen UBD / Angkatan 33 / A R1**

MK : **Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi**

Dosen : **Dr. Farhat Syukri, SE, M.Si**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.

- **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
- **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

Nama : **Achmad Murdiansyah**

Nim : **182510101**

Prodi : **S2 Manajemen UBD / Angkatan 33 / A R1**

MK : **Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi**

Dosen : **Dr. Farhat Syukri, SE, M.Si**

WIRAUSAHA BIROKRASI

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.

- **Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.**
- **Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara**

Di era otonomi daerah ini menurut pendapat saya Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap system dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsive terhadap berbagai jenis kebiajakn agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut. Pelaksanaan wirausaha birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsi mewirausahakan birokrasi.

Konteks kemunculan mewirausahakan birokrasi berawal dari

1. Organisasi pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal.
2. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

2. Mengapa Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan pbulik, dan pemersatu bangsa.

Kalimat Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi merupakan proses bagaimana menata dan mengolah birokrasi yang semula kaku menjadi birokrasi yang professional, inovatif dan tidak menyeleweng.

Upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi sehingga **pimpinan organisasi perlu memiliki kepemimpinan wirausaha**.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor public

NAMA : AMELLYA

NIM : 182510085

MATA KULIAH : MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

DOSEN : Dr. FARHAT SYUKRI, S.E., M.Si

PROGRAM STUDI MANAJEMEN - S2

UNIVERSITAS BINA DARMA

TUGAS II E-LEARNING

PERUBAHAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN KE ORGANISASI

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia?
   Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.
   Bagaimana pendapat Saudara, harap kemukakan sesuai analisa/persepsi Saudara?

Jawab:

Mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausahakan birokrasi disini berarti mengubah sistem, atau pengaturan birokrasi yang kaku, kulturis da irasionil.

Konteks mewirausahakan birokrasi ini sendiri muncul dari adanya:

a) Organ pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat *spending* daripada mendatangkan profit (keuntungan) dalam wilayah fiskal
b) Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Praktek mewirausahakan birokrasi merupakan pola dalam mengubah tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik agar birokrasi tidak terpengaruh oleh kebijakan

kepentingan golongan, kultur dan lain sebagainya. Perilaku mewirausahakan birokrasi juga dibutuhkan sikap responsive dan akuntabel dari pemerintah atau birokrat itu sendiri terhadap sistem dan pelayanan yang diterapkan. Sebagai masyarakat pun harus bertindak proaktif dan responsif terhadap berbagai jenis kebijakan agar senantiasa mengawasi secara langsung dalam pelayanan birokrasi tersebut.

2. Apakah pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha padahal tujuan pencari kerja menjadi pegawai pemerintah tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Indonesia. Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab:

Di era otonomi daerah, menurut pendapat saya, pemahaman atas cara-cara mewirausahakan birokrasi Pemerintah harus dikuasai oleh aparat birokrasi, terlebih oleh pimpinan organisasi pemerintah.

Mewirausahakan birokrasi akan berdampak pada perubahan-perubahan (Reformasi) dalam instansi pemerintah. Perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme birokrasi-wirausaha di setiap lapisan birokrasi. Perubahan tersebut dapat berupa debirokratisasi, deregulasi, rekonstruksi pemerintahan, reposisi instansi-instansi, bahkan rasionalisasi pegawai. Dalam perkembangannya, upaya-upaya penyesuaian tersebut harus dapat menjamin terciptanya produktivitas dan efisiensi kerja pemerintah yang maksimal.

Transformasi kewirausahaan ke dalam birokrasi dapat dilakukan dengan landasan makro dan mikro, dan keduanya harus dijalankan secara bersama-sama serta berkesinambungan.

a) Landasan makro

Adapun landasan mikro yang dimaksud adalah merubah regulasi kepegawaian, pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja para ASN agar mereka bertransformasi menjadi ASN sebagai pelayan masyarakat yang produktif dan kompetitif. Selain itu, harus dipastikan keberlangsungan berjalannya sistem yang baik, sehingga terjadi perubahan positif menuju perbaikan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model

pelayanan publikseperti model *contracting out* dan *franchising.* Model *contracting out*, dimana pemerintah memegang peran penting sebagai pengatur, sedangkan pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang. Sedangkan model *franchising*, pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan *price regularity* untuk mengatur harga maksimum.

b) Landasan mikro

Adapun landasan mikro yang dimaksud adalah:

a. Penetapan Standar Pelayanan (SOP), Lanjutan (Penyempurnaan) Standar Pelayanan Minimum (SPM)
b. Pelaksanaan survei pelayanan publik
c. Pembuatan indeks pelayanan publik (IKM)
d. Pengembangan sistem manajemen pengaduan
e. Pelayanan yang baik terhadap publik.

Di era otonomi daerah sekarang ini, menurut saya program mewirausahakan birokrasi sangatlah baik untuk diterapkan karena dengan adanya otonomi membuat setiap daerah berupaya untuk mengatur birokrasi agar dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif dan profesional serta enterpreneur. Enterpreneur disini berarti pemerintah daerah mempunyai semangat kewirausahaan dimana birokrasi diusahakan lebih inovatif dalam memberikan pelayanan publik agar dapat menjawab perkembangan masayarakat di era globalisasi.

MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Disusun Oleh :

Nama : Angga Saputra

NIM : 182510105

Mata Kuliah : Manajemen Perubahan Dan Pengembangan Organisasi

Program Studi Manajemen S2

Universitas Bina Darma

Palembang

2020

TUGAS II E LEARNING

MATA KULIAH : MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PROGRAM STUDI :MANAJEMEN S2 ANGKATAN 33A/R1
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
TAHUN 2019/2020

DOSEN :Dr. FARHAT SYUKRI, SE. M.Si

Setelah membaca materi II e learning Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi, maka kepada mahasiswa ditugaskan menganalisa :

1. Mengapa Pemerintah Indonesia mendorong program mewirausahakan birokrasi di Indonesia.
   - Apa latar belakang munculnya pemikiran tersebut.
   - .Bagaimana pendapat saudara, harap kemukakan sesuai analisa / persepsi saudara
2. Apakah Pimpinan organisasi pemerintah perlu memiliki kepemimpinan wirausaha, padahal tugas dan fungsi pegawai pemerintah adalah pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Jelaskan pendapat saudara !!

SELAMAT BEKERJA

1. Latar Belakang Munculnya Pemikiran Program Mewirausahakan Birokrasi Di Indonesia

Dalam dominasi sistem kapitalisme dan liberalisme yang menjangkiti (hampir) seluruh sistem ekonomi di dunia, gerakan kewirausahaan merupakan penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berperspektif keadilan sosial. Dengan semangat kolektivisme, kewirausahaan merupakan wadah ekonomi yang memberdayakan sumber daya internal secara mandiri dengan semangat kebersamaan.

Dalam praktik negara kesejahteraan, dibutuhkan peran pemerintah yang responsif untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan. Negara dituntut untuk campur tangan dalam bidang-bidang perlindungan sosial, terutama melalui regulasi ekonomi dan pembentukan norma-norma sosial.

Upaya perlindungan sosial dibebankan pada investasi terhadap manusia untuk mengaktifkan sumber daya manusia. Sistem perlindungan sosial bukan dipahami secara eksklusif dengan dikotomi sederhana antara aktor negara dengan non-negara, melainkan diintegrasikan sebagai kesatuan kolektif yang tidak melemahkan satu sama lain. Dalam hal ini, kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk turut mengatur kegiatan mikroekonomi dan makroekonomi.

2. Pimpinan Organisasi Pemerintah Perlu Memiliki Kepemimpinan Wirausaha

   Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan.